

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

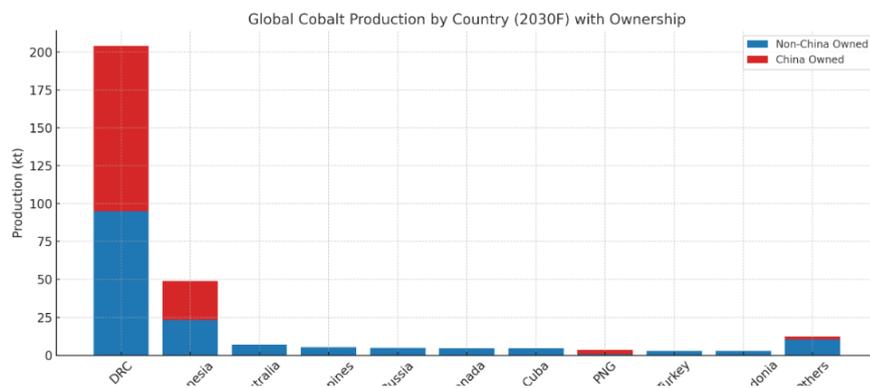
Permasalahan lingkungan saat ini sedang menjadi sorotan bagi dunia, emisi karbon di dunia semakin meningkat dan dapat menjadi masalah serius bagi dunia jika terus dibiarkan. Melihat masalah tersebut diperlukan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Salah satu solusinya yaitu menggunakan energi terbarukan yang dinilai dapat lebih mudah dimanfaatkan dan praktis. Energi ini dalam perkembangannya dinamakan sebagai “Green Technology”. Adanya transisi dari minyak bumi ke baterai lithium ion yang digunakan sebagai sumber daya perangkat telepon dan kendaraan listrik merupakan wujud nyata. Transisi energi membuat kobalt yang merupakan bahan baku baterai lithium ion semakin dilirik negara maju.

Produksi kobalt terbesar berada di negara Republik Demokratik Kongo (RDK). Pada tahun 2023, terdapat sekitar enam juta ton cadangan kobalt, itu berarti RDK telah berkontribusi lebih dari 75% dari produksi kobalt di dunia (Shanghai Metals Market, 2024). Dalam konteks pendapatan domestik, kobalt merupakan barang ekspor terbesar negara Kongo, jumlah nilai ekspor nasionalnya mencapai lebih dari 60% dibandingkan barang ekspor lainnya (Statista, 2022).

Namun, ternyata mayoritas produksi kobalt RDK tersebut bukan kepunyaan pribadi negara RDK, melainkan milik perusahaan Tiongkok yang didirikan di negara RDK. Tiongkok sendiri telah memproduksi pasokan mineral penting di dunia. Beberapa di antaranya yaitu 73% kobalt, 68% nikel dunia, 59% litium, dan

40% tembaga (Venditti, 2024). Melihat angka tersebut dapat di lihat bahwa Tiongkok lebih tertarik untuk memproduksi kobalt. Menurut Benchmark Mineral Intelligence, Tiongkok berambisi untuk mengontrol pasokan kobalt dunia dengan memberikan perkiraan angka produksi di tahun 2030 (Benchmark Minerals, 2024).

Proyeksi kontrol Tiongkok atas pasokan kobalt dunia pada tahun 2030 ditunjukkan dalam diagram tersebut. Produksi kobalt global dibagi menjadi dua



Gambar 1. 1 Produksi Kobalt Global
Sumber: (Benchmark Minerals, 2024)

kategori, yaitu produksi yang dimiliki oleh perusahaan non-Tiongkok dan produksi yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok. Dalam kategori perusahaan non-Tiongkok, total produksi kobalt di seluruh dunia diperkirakan mencapai 161 ribu metrik ton, dengan RDK sebagai produsen terbesar, menyumbang sebesar 95 ribu metrik ton (Benchmark Minerals, 2024).

Sedangkan produksi kobalt yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok di seluruh dunia diproyeksikan mencapai 140 ribu metrik ton. RDK tetap menjadi pusat utama produksi dengan 109 ribu metrik ton (Benchmark Minerals, 2024). Tiongkok semakin memperkuat dominasinya dalam industri kobalt terlebih

Tiongkok berencana menginvestasikan hingga tujuh miliar dolar AS dalam pengembangan infrastruktur pertambangan di RDK dalam dekade mendatang.

Dominasi Tiongkok akan kobalt di RDK, membuat RDK terkena dampaknya. Dampak yang ada bukan hanya dampak positif maupun dampak negatif juga dihadapi oleh rakyat RDK. RDK merupakan negara dengan sumber daya mineral yang sangat kaya. Kekayaan RDK tersebutlah yang membuat RDK mengalami eksploitasi oleh negara-negara dunia pertama. Eksploitasi ditunjukkan melalui adanya pertambangan di RDK yang memanfaatkan kobalt secara terus menerus untuk perkembangan green technology (Technode Feed, 2022)

Terbangunnya pertambangan kobalt di RDK memang akan membuat warga RDK menjadi memiliki kesempatan kerja yang luas, namun jika pertambangan ini dijalankan tanpa memperhatikan aspek-aspek kehidupan yang lain dan hanya memikirkan keuntungan yang akan didapat tentu hal tersebut dapat merugikan negara RDK. Dalam praktiknya, pertambangan kobalt justru merugikan masyarakat RDK terlebih masyarakat yang tinggal di dekat area pertambangan.

Masyarakat RDK yang tinggal di area pertambangan relatif terkena tantangan-tantangan besar terkait keberlangsungan kehidupan mereka. Aspek-aspek dasar keamanan manusia yang harusnya didapat justru kian terancam. Hal ini dibuktikan dengan adanya keadaan kerja yang tidak layak. Kerja yang tidak layak ini ditunjukkan dengan adanya kerja paksa, mempekerjakan anak di bawah umur, serta jam kerja yang tidak sesuai dan tidak adanya jaminan keselamatan bekerja (Arhama Nurikhtiar, 2023).

Selain itu, RDK telah mengalami degradasi lingkungan secara signifikan. Air dan tanah yang merupakan salah satu sumber kehidupan Masyarakat RDK tercemar sehingga menyebabkan pula kesehatan masyarakat RDK terdampak. Keadaan diperburuk oleh pemerintah Kongo yang kurang menegakkan peraturan dalam industri pertambangan (Mann, 2017). Sebetulnya RDK telah membuat peraturan dalam kaitannya dengan pertambangan. Di antaranya yaitu, Mining Code tahun 2002, Mining Regulation tahun 2003, dan amandemen Mining Code tahun 2018. Di antaranya yaitu, Mining Code tahun 2002, Mining Regulation tahun 2003, dan amandemen Mining Code tahun 2018, memformalisasi tambang skala kecil, dan pada tahun 2010 Peraturan Presiden juga dikeluarkan untuk melarang aktivitas pertambangan (Copper belt katanga mining, 2020) .

Namun peraturan presiden pada Maret 2011 dicabut, dan regulasi tidak efektif, sehingga upaya pemerintah untuk mengatasi masalah penambangan tampaknya sejauh ini tidak berhasil. Tindakan yang dilakukan pemerintah RDK, seperti keputusan presiden yang melarang kegiatan ekstraktif, pada praktiknya justru mengakibatkan para penambang terpaksa melakukan kegiatan penambangan ilegal agar dapat terus bekerja (Pein, 2022).

Di sisi lain, pertambangan milik Tiongkok tidak mau menaati peraturan pasal 81 dan 204 UU Minerba Pasal 357 dan 358 UU Minerba yang mewajibkan pemegang kuasa pertambangan dan badan usaha pengolah untuk bersikap bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial di wilayah operasinya ditandai dengan dimilikinya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

dan Sosial (AMDAL) yang telah disetujui, khususnya oleh masyarakat di sekitar kegiatannya, dan memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (RPL). Investigasi lapangan mengungkapkan bahwa perusahaan Tiongkok tidak memiliki AMDAL dan APLS untuk menjalankan dan mengelola dampak negatif kegiatannya terhadap lingkungan (AFREWATCH, 2024).

Bahkan sejak tahun 2018, perusahaan kobalt Tiongkok semakin memperlihatkan aktivitas eksploitasinya. Pada tahun tersebut, produksi kobalt meningkat drastis dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 104.000 metrik ton dari yang sebelumnya hanya 73.000 metrik ton. Produksi kobalt terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga tahun 2024 mencapai 244.000 metrik ton (fatshimetric, 2024). Peningkatan jumlah produksi kobalt tersebut disebabkan karena Tiongkok melakukan ekspansi dan penguasaan lahan baru. Ekspansi yang dilakukan Tiongkok sering kali dilakukan tanpa persetujuan warga lokal dan hal tersebut merupakan salah satu contoh Tiongkok tidak mengimplementasikan regulasi pemerintah RDK (Witness, 2021).

Dalam konsep keamanan manusia, yang mana mementingkan perlindungan individu dari adanya ancaman yang dapat membahayakan keselamatannya seperti kekerasan dan kekurangan, kondisi di atas menunjukkan adanya aktivitas ekonomi terlebih pertambangan kobalt oleh perusahaan Tiongkok, tidak hanya mengganggu kedaulatan negara RDK tetapi juga langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat RDK. Terlebih dengan minimnya regulasi pemerintah RDK yang kurang serius untuk mengawasi aktivitas perusahaan

Tiongkok, membuat masyarakat RDK tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membela diri akan lingkungan yang layak dan keadilan sosial yang terjamin.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas konsep keamanan manusia yaitu pertama tulisan yang ditulis oleh Mirjam A. F. Ros Tonen, Jane J. Aggrey, Dorcas Peggy Somuah, dan Mercy Derkyi berjudul *Human Insecurities in Gold Mining: A Systematic Review of Evidence from Ghana* (2021) dan dimuat dalam jurnal ELSEVIER: The Extractive Industries and Society. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan manusia untuk menjelaskan ketidakamanan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan emas di Ghana. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pertambangan emas di Ghana menimbulkan ketidakamanan manusia di dimensi keamanan lingkungan dan kesehatan.

Kedua yaitu skripsi berjudul *Sikap Masyarakat Internasional terhadap Ancaman Human Security Tambang Skala Kecil Ilegal di Republik Demokratik Kongo (RDK)* milik Agung Yudha Wibowo. Tulisan ini menggunakan konsep human security untuk membahas tentang pertambangan ilegal di RDK dan mencari tahu sikap masyarakat internasional terhadap permasalahan yang ada. Pada kedua tulisan di atas dimensi keamanan manusia yang di bahas hanya keamanan lingkungan dan kesehatan. Meskipun tulisan kedua juga membahas tentang keamanan pribadi, namun keamanan lain tidak diangkat dalam tulisannya.

Selanjutnya yaitu tulisan yang membahas Kongo dan pertambangan

kobaltnya, tulisan berjudul *Di Balik Keterbelakangan Kongo: Pengaruh Huayou Cobalt dalam Kerjasama Pertambangan Kongo dan Tiongkok* yang ditulis oleh Denta Utama, Mohamad Rosyidin, Fendy Eko Wahyudi. Tulisan ini membahas tentang negara Kongo yang bergantung kepada Tiongkok dan tidak dapat keluar dari keterpurukan. Penelitian ini menggunakan teori neo-marxisme dan teori ketergantungan. Di sini digambarkan bahwa investasi yang diberikan Tiongkok membuat Kongo terjebak karena struktur internasional yang timpang dan ketidakmampuan Kongo dalam menangani masalah dalam negerinya. Tulisan ini lebih berfokus pada sistem ekonomi internasional dan tidak membahas aspek keamanan manusia.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tercantum di atas, penulis menemukan celah penelitian yang belum pernah dilakukan, yaitu Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Kobalt Tiongkok terhadap dimensi Keamanan Manusia di Republik Demokratik Kongo Tahun 2018-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya adalah “Bagaimana aktivitas pertambangan kobalt oleh Tiongkok berdampak terhadap dimensi keamanan manusia masyarakat Republik Demokratik Kongo tahun 2018-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum tujuan dari penulisan ini adalah guna memenuhi tugas akhir

mata kuliah skripsi di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas pertambangan kobalt oleh Tiongkok berdampak terhadap keamanan manusia masyarakat Republik Demokratik Kongo tahun 2018-2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Eksploitasi Sumber Daya Alam

Aktivitas memanfaatkan stok sumber daya alam yang berada di suatu lokasi atau wilayah disebut sebagai eksploitasi. Eksploitasi sumber daya alam ini harus disertai dengan manfaat yang setimpal bagi negara dan masyarakat di negara tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang eksploitasi mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat tempat eksploitasi dilakukan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Baransano, eksploitasi akan membuat ekosistem mengalami kerusakan dan akan berakibat pada tren penurunan populasi dan bahkan pada kondisi tertentu dapat menyebabkan kepunahan (baransano, 2011).

Kasmawati juga mengungkapkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang terlalu berlebih dan tidak melibatkan perencanaan yang baik seperti memperhatikan faktor lingkungan akan memberikan dampak yang buruk dan menyebabkan bencana serta malapetaka ekologis bagi kehidupan manusia (Kasmawati, 2011). Eksploitasi sumber daya alam dapat berupa aktivitas pertambangan mineral, penebangan pohon di hutan, ekstraksi gas dan minyak,

dan lain sebagainya. Negara dengan sumber daya alam yang melimpah memang sering kali memanfaatkan sumber daya yang dipunya untuk membantu pertumbuhan ekonomi mereka.

Secara umum, sumber daya alam yang diolah secara konvensional dan tidak memperhatikan keberlanjutan memang akan membawa keuntungan secara ekonomi. Namun, seperti yang telah dikemukakan oleh Baransano dan Kasmawati eksploitasi akan membawa dampak yang buruk. Terlebih pada masa selanjutnya atau generasi kehidupan mendatang. Karena tidak dapat dipungkiri, sumber daya alam yang ada di bumi ini jika dimanfaatkan secara terus menerus akan habis juga pada akhirnya.

1.4.2 Keamanan Manusia

Konsep keamanan manusia menjadi perhatian setelah perang dingin, di mana dunia menyadari bahwa keamanan bukan saja berbicara tentang negara, militer dan perang namun keamanan juga harus memperhatikan kehidupan manusia (Persaud, 2022). Dengan kata lain, keamanan manusia merupakan pergeseran fokus keamanan, yang sebelumnya berfokus pada keamanan negara beralih menjadi keamanan individu. (Shahrbanou Tadjbakhsh, 2007) mendefinisikan keamanan manusia sebagai keamanan manusia yang digambarkan melalui tiga elemen, pertama yakni *freedom of fear* atau jika diterjemahkan berarti kebebasan dari rasa takut.

Maksudnya di sini yaitu manusia harus terbebas dari ancaman yang membahayakan keselamatan mereka baik secara fisik maupun non fisik, dan juga kekerasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua adalah

freedom from want, dengan kata lain kebebasan dari rasa kekurangan. Rasa kekurangan harus tidak ada dalam diri manusia dan perlindungan akan kualitas hidup, kebutuhan dasar, dan mata pencaharian serta terjadinya peningkatan kesejahteraan hidup manusia harus tercukupi.

Ketiga atau terakhir, *freedom from indignity*, merupakan kondisi yang mengharuskan manusia terbebas dari rasa tidak hormat atau penghinaan. Kondisi ini dapat dicapai jika individu ataupun kelompok dipastikan akan diberikan perlindungan atas hak dasar mereka, dan diberikan izin untuk dapat membuat pilihan serta mengambil kesempatan yang menguntungkan mereka dan tidak merugikan pihak lain.

Di dalam konsep keamanan manusia terdapat tujuh dimensi keamanan, di mana masing – masingnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apabila terjadi salah satu ketidakamanan, maka dampaknya akan dapat berpengaruh terhadap dimensi lainnya. Di antaranya yaitu ekonomi, pangan kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan keamanan politik (Shahrbanou Tadjbakhsh, 2007).

1.4.2.1 keamanan Ekonomi

keamanan ekonomi ialah keamanan yang didapat oleh manusia untuk memperoleh kehidupan terjamin seperti dapat memenuhi kebutuhan hidup selama mereka hidup. Ekonomi menjadi tidak aman ketika terjadi kemiskinan yang berkepanjangan, adanya pengangguran, gaji di bawah rata-rata, dan lain sebagainya. Sascha Werthes memberikan indikator yang dapat mengukur bahwa

ekonomi masuk kategori aman. Pertama yaitu GDP per Capita (PPP) maksudnya ialah tingkat ekonomi dapat dilihat dari pendapatan per kapita berdasarkan daya beli, hal tersebut akan terlihat apakah suatu negara mengalami kemakmuran ekonomi atau tidak. Kedua dapat dilihat dari BTI – Social Nets, dalam hal ini negara dapat dilihat dimensi ekonominya aman ketika jaringan perlindungan sosialnya kuat (Sascha Warthes, 2011).

1.4.2.2 Keamanan Pangan

Keamanan pangan yang merupakan keamanan terkait apa yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Manusia harus mendapatkan nutrisi dasar dari apa yang dikonsumsinya. Ancaman dari keamanan pangan dapat berupa adanya kelaparan, sulitnya akses makanan sehat, harga bahan pangan yang mengalami kenaikan, dan lain sebagainya. Indikator yang mengukur yaitu dapat dilihat dari jumlah penduduk yang kekurangan gizi dan jumlah anak berusia di bawah lima tahun yang mengalami kekurangan gizi (Sascha Warthes, 2011).

1.4.2.3 Keamanan Kesehatan

Manusia memperoleh jaminan akan amannya kesehatan mereka sehingga terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti malnutrisi, sanitasi buruk, epidemi dan lain-lain. Keamanan kesehatan juga berarti mudahnya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Indikator yang mengukur yaitu tingkat kematian anak dan jumlah penduduk yang terkena dampak pandemi (Sascha Warthes, 2011).

1.4.2.4 Keamanan Lingkungan

Maksudnya adalah manusia harus mendapatkan lingkungan yang tidak

membahayakan keberlangsungan hidupnya, yang terdiri dari ancaman lingkungan ialah degradasi lahan, bencana alam, polusi udara, dan sumber daya yang menipis di wilayah yang ditinggalinya. Indikator yang dapat mengukur yaitu jumlah populasi yang terdampak bencana alam baik buatan ataupun alami dan penduduk yang dapat akses ke sanitasi dan air yang bersih (Sascha Warthes, 2011).

1.4.2.5 Keamanan Pribadi

Seorang pribadi harus mendapatkan jaminan perlindungan dari negara. Keamanan pribadi ini harus diperoleh karena merupakan hak seseorang yang telah melekat sejak dia dilahirkan. Bentuk ancaman dari keamanan pribadi ialah kekerasan verbal maupun fisik, usia anak dipekerjakan, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Indikator yang mengukur yaitu terlihat dari indeks yang mengukur tingkat teror seperti penyiksaan (Sascha Warthes, 2011).

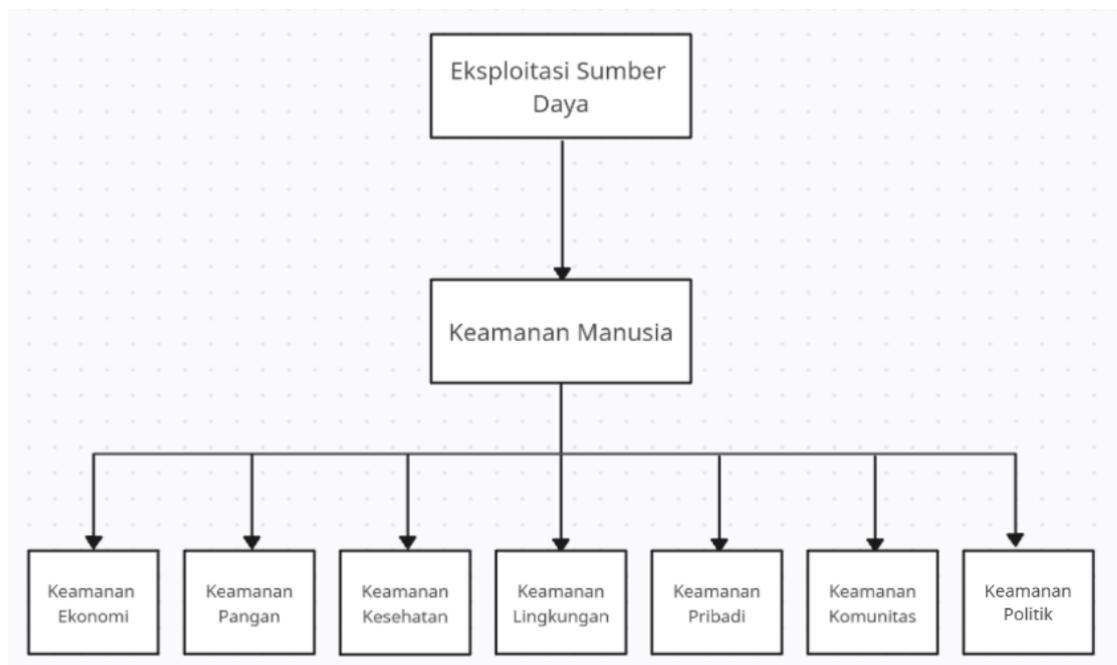
1.4.2.6 Keamanan Komunitas

Keamanan komunitas, di mana keamanan ini difokuskan pada kelompok atau golongan dari manusia itu sendiri. Bentuk ancaman dari keamanan komunitas ialah konflik antar etnis, agama, atau identitas lainnya dan kejahatan terorisme. Indikator yang mengukur menurut Sascha Werthes ialah total orang yang diberikan bantuan oleh UNHCR seperti pengungsi internal (Sascha Warthes, 2011). Keamanan komunitas berkaitan dengan data UNHCR karena pengusuran paksa akibat ekspansi tambang menimbulkan dislokasi terhadap kelompok masyarakat secara kolektif. Ketika komunitas kehilangan tempat tinggal tanpa jaminan relokasi yang layak, hal ini mencerminkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan tempat tinggal yang layak.

1.4.2.7 Keamanan Politik

Manusia berhak untuk menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan, selain itu hukuman dan keadilan harus ditegakkan untuk menjamin keamanan ini. Bentuk ancaman dari keamanan politik ialah adanya pelanggaran hak asasi manusia, represi politik, dan minimnya supermasi hukum serta kurangnya penegakan keadilan. Indikator untuk mengukur yaitu adanya kebebasan pers dan kombinasi indikator politik dan hak sipil dalam proyek Cingranelli-Richards Human Rights Data Project (CIRI) (Sascha Warthes, 2011). CIRI berisi mengenai indikator informasi tentang perlakuan pemerintah terhadap hak asasi manusia yang diakui internasional.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran

1.6 Argumen Utama

Perusahaan milik Tiongkok yang berada di Republik Demokratik Kongo (RDK) telah melakukan aktivitas pertambangan yang buruk dan tidak menghormati standar lingkungan dan hak asasi manusia yang dijamin oleh perjanjian internasional, konstitusi, dan undang-undang pertambangan RDK. Akibat hal tersebut, tujuh dimensi keamanan manusia pada masyarakat RDK mengalami ancaman. Pertama, dalam hal keamanan ekonomi, data dari BTI (Bertelsmann Transformation Index) menunjukkan kesenjangan sosial melebar dan tidak ada peningkatan signifikan pada indeks kesejahteraan masyarakat lokal dan Warga lokal. Kedua, keamanan pangan, WFP (World Food Programme) melaporkan bahwa kerawanan pangan akut pada tahun 2023, sebagian besar berada di wilayah pertambangan kobalt. Ketiga, keamanan kesehatan, terdapat peningkatan kasus penyakit kulit dan ISPA. Keempat, keamanan lingkungan, aktivitas pertambangan menghasilkan logam berat beracun (uranium, arsenik) lebih dari batas yang ditentukan WHO tidak mendapatkan akses air bersih akibat adanya limbah pertambangan. Kelima, keamanan pribadi, adanya perampasan tanah dan intimidasi terhadap warga lokal yang menolak ekspansi tambang. Keenam komunitas, data UNHCR menunjukkan peningkatan pengungsi internal di RDK, di antaranya dari wilayah pertambangan konflik. Ketujuh, keamanan politik di mana RDK termasuk peringkat bawah dalam Indeks Kebebasan Pers, dan adanya intimidasi terhadap jurnalis yang mengungkap pelanggaran di industri tambang.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis memilih untuk menggunakan metode pendekatan penelitian eksplanatif. Eksplanatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan lebih menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya fenomena. Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti bagaimana Republik Demokratik Kongo mengalami ancaman human security akibat pertambangan kobalt milik Tiongkok.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya suatu jangkauan yang dimaksudkan sebagai batasan penelitian agar tidak terjadi tumpang tindih dan perdebatan yang tidak sesuai dengan fokus kerangka masalah penelitian penulis. Alhasil, batasan masalah penulis dalam penelitian ini semata-mata hanya berfokus untuk menganalisa dampak pertambangan kobalt yang dialami masyarakat Kongo pada tahun 2018-2024.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan dokumen, data, laporan tahunan, website internet, surat kabar serta penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder karena menggunakan informasi dan data hasil penelitian yang saling berhubungan dengan tujuan penulisan (Nazir, 2003).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memfokuskan pada teknik analisis data kualitatif. Menurut Emzir, data kualitatif adalah data yang disusun berdasarkan data yang telah

dikumpulkan, dikategorikan, dipilah-pilah, dikelola, disintesis, dan dilanjutkan dengan mencari pola pada data yang telah diidentifikasi, dan menentukan apa yang penting, apa yang dapat dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada pihak luar (Emzir, 2011). Langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data serta informasi menggunakan metode pengamatan data-data yang sehubungan dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2012)

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I Merupakan pendahuluan dan gambaran umum rencana penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumentasi utama, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisi tentang penjelasan mengenai bentuk ancaman keamanan ekonomi, pangan dan kesehatan yang diterima masyarakat RDK

Bab III merupakan bab yang berisi tentang analisis mengenai bentuk ancaman keamanan lingkungan, pribadi, komunitas dan politik yang diterima masyarakat RDK

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berasal dari keseluruhan penelitian.